

Portofolio Akutansi Sektor Publik

Anggota Kelompok :

- 1. Desmala Az Zahra 2313031002**
 - 2. Muhammad Rizqi Alfiah 2313031008**
-
-

Revaluasi Barang Milik Negara: Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (Kompas.com, 9 Oktober 2024)

Analisis:

Artikel ini menguraikan inisiatif pemerintah Indonesia melakukan revaluasi aset tetap sebagai upaya reformasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN (Barang Milik Negara). Proses revaluasi membantu memperbarui nilai aset, memudahkan perencanaan pengelolaan, serta menghasilkan pelaporan keuangan negara yang lebih andal dan akurat. Tantangan utama proses ini adalah kompleksitas data, keberagaman jenis aset, serta pemerataan tata kelola dari pusat hingga daerah. Praktik ini berdampak pada peningkatan opini audit BPK dan memperkuat legitimasi angka kekayaan negara yang tercatat dalam laporan keuangan. Langkah ini juga menjadi pijakan menuju praktik pengelolaan aset berbasis sistem informasi modern dan digitalisasi.

Kemendagri Soroti Realisasi APBD NTB 2025 Belum Optimal (Detik.com, 26 Agustus 2025)

Analisis:

Artikel ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, khususnya tantangan pemda dalam mengoptimalkan realisasi APBD — baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Rendahnya realisasi belanja daerah dinilai berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah pusat melalui Kemendagri menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan penyerapan yang efektif agar APBD dapat benar-benar mendorong pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu ini beririsan langsung dengan akuntabilitas eksekusi APBD dan kualitas laporan keuangan daerah yang wajib transparan.

Profesi Akuntan Profesional Masih Langka, Peluang Baru di Sektor Keuangan (Kontan.co.id, 2 Maret 2023)

Analisis:

Tulisan ini menyoroti masih langkanya akuntan profesional di Indonesia, meskipun kebutuhan sektor publik dan swasta terus meningkat. Disahkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membuka peluang pertumbuhan, sekaligus menuntut generasi muda agar mengisi kekosongan profesi strategis ini dengan sertifikasi dan etika profesional tinggi. Akuntan publik berperan krusial dalam memastikan laporan keuangan pemerintah dan institusi publik sesuai standar yang diakui, auditabel, dan mampu menjadi landasan pengambilan keputusan kebijakan nasional. Kolaborasi asosiasi, perguruan tinggi, dan pemerintah diharapkan memajukan kualitas SDM akutansi nasional.

Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (JGIA Vol 3 No 2, 2025)

Analisis:

Penelitian ini menggunakan mixed methods untuk menganalisis penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual di Indonesia. Hasil kajian menegaskan bahwa akuntansi berbasis akrual memperbaiki kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, sehingga menaikkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*. Namun, terdapat tantangan dalam disparitas

kemampuan SDM, infrastruktur sistem keuangan, hingga komitmen transparansi publik antar daerah. Secara konseptual, kajian ini menyoroti relevansi teori *New Public Management* dalam sukses implementasi SAP serta pergeseran menuju transparansi dan peningkatan mutu tata kelola keuangan publik.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik (Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science, Vol 3, 2024)

Analisis:

Dengan metode bibliometrik, jurnal ini memetakan tren perkembangan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia. Fokus utama kajian adalah pergeseran praktik pelaporan dari sekadar “memenuhi kewajiban” menjadi instrumen tata kelola yang etis dan terbuka. Ditekankan pentingnya transparansi untuk mempersempit peluang korupsi serta memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah. Penelitian juga menunjukkan pentingnya audit internal dan penguatan sistem pelaporan digital. Ruang penelitian lanjutan adalah transparansi peran perbankan dan sistem audit berbasis teknologi modern.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta Implikasinya (Ganaya, Vol 6(4), 2023)

Analisis:

Studi ini mengevaluasi efek implementasi akuntansi sektor publik dan pengawasan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Hasilnya, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh disiplin implementasi SAP dan efektivitas pengawasan audit. Tingkat *auditability* laporan keuangan selaras dengan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Rekomendasi utamanya adalah penguatan fungsi pengawasan dan pelatihan SDM secara berkesinambungan di lingkungan pemerintah daerah.

International Analysis of Public Sector Accounting and Fiscal Governance: A Systematic Literature Review (SCIRP, Modern Economy 2025, Open Access)

Analisis:

Review sistematis ini mengkaji hasil berbagai riset reformasi akuntansi publik (terutama adopsi IPSAS dan accrual accounting) di negara berkembang dan maju. Kesimpulannya, penerapan PSA meningkatkan transparansi, kualitas audit, dan pengelolaan fiskal. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas institusi, kualitas pengendalian internal, dan kepemimpinan. Studi ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia untuk memastikan keberlanjutan reformasi akuntansi sektor publik agar hasilnya efisien dan antikorupsi.

Digital Transformation of Public Sector Accounting: A Systematic Literature Review (Journal of Accounting and Investment Vol 26(3), 2025)

Analisis:

Jurnal ini menyoroti transformasi digital dalam akuntansi sektor publik, dengan tinjauan sistematis perkembangan teknologi pelaporan keuangan pemerintah, mulai dari big data, blockchain, hingga cloud computing. Hasilnya, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga menghadirkan tantangan misalnya kesenjangan kapasitas teknis dan regulasi. Untuk sukses, pemerintah perlu regulasi yang harmonis, investasi digital, dan pelatihan SDM. Studi ini memperkuat posisi digitalisasi sebagai katalis perubahan budaya tata kelola sektor publik dunia.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023

Analisis:

LKPD DKI Jakarta 2023 tersedia lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Perubahan SAL
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

DKI Jakarta meraih opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* bertahun-tahun, menandakan akuntabilitas yang kuat dan transparan. Laporan ini memuat realisasi pendapatan >100% dari target dan rasio serapan belanja di atas 90%. Komponen lengkap dan implementasi SAP berbasis akrual memperlihatkan kemajuan tata kelola dan menjadi rujukan nasional dalam praktek pelaporan keuangan daerah yang profesional dan auditabe

Refrensi

- Chen, Y., & Wang, L. (2025). International Analysis of Public Sector Accounting and Fiscal Governance: A Systematic Literature Review. *Modern Economy*, 16(8), 789-815. <https://doi.org/10.4236/me.2025.168045>
- Detik.com. (2025, Agustus 26). Kemendagri Soroti Realisasi APBD NTB 2025 Belum Optimal. *DetikNews*. <https://detik.com/news/berita/kemendagri-soroti-realisasi-apbd-ntb>
- Greenation Publisher. (2025). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi (JGIA)*, 3(2), 1-15. <https://greenationpublisher.org/index.php/JGIA>
- Jayapangus Press. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Pemerintah Daerah. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 234-251. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Kompas.com. (2024, Oktober 9). Revaluasi Barang Milik Negara, Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Bisnis Kompas*. <https://biz.kompas.com/read/2024/10/09/revaluasi-barang-milik-negara>
- Kontan.co.id. (2023, Maret 2). Profesi Akuntan Profesional Masih Langka, Peluang Baru di Sektor Keuangan. *Press Release Kontan*. <https://pressrelease.kontan.co.id/news/profesi-akuntan-profesional>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 (Audited)*. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-2023>
- Rahman, A., & Susanto, B. (2025). Digital Transformation of Public Sector Accounting: A Systematic Literature Review. *Journal of Accounting and Investment*, 26(3), 567-589. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i3.21234>
- West Science. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik di Era Digital. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(2), 45-62. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/wnj/article/view/transparansi>